

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah dikemukakan dalam Bab I dan Bab II skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemeliharaan data Pendaftaran Tanah khususnya peralihan Hak Milik atas tanah karena jual-beli pada tahun 2013 dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tidak ada kendala selama terjalin koordinasi yang baik antara pihak pemohon pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah dan PPAT wilayah Kabupaten Sleman. Artinya selama semua dokumen-dokumen persyaratan lengkap dan sertipikat sesuai dengan data buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman maka proses pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam pemeliharaan data Pendaftaran Tanah khususnya peralihan Hak Milik atas tanah karena jual-beli pada tahun 2013 telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang berwenang di Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman dengan PPAT wilayah Kabupaten Sleman. Dalam melaksanakan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena jual-beli sampai sertipikat diterbitkan, dari 15 responden seluruhnya tidak ada yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan.

B. Saran

Untuk pihak pemohon pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah yang akan melakukan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena jual-beli terlebih dahulu memenuhi semua dokumen-dokumen persyaratan (terutama pembayaran dan / atau validasi Surat Setoran Pajak (SSP) di Kantor Pajak Pratama Kabupaten Sleman dan Surat Setor Pajak Daerah (SSPD)-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman) sebelum meminta PPAT wilayah Kabupaten Sleman untuk membuat akta sehingga antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan PPAT terjalin koordinasi yang baik dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Jambatan, Jakarta

Eddy Ruchiyat, 2004, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung

Effendi Perangin-angin, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.

-----, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Herman Hermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung

Jimmy Joses Sembiring, 2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta

Josef Johannes Blitanagi, 1984, *Hukum Agraria Nasional*, Nusa Indah, Kupang

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1960, No. 104

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1997, Nomor 59

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan

Internet:

<http://adm-pertanahan.blogspot.com/2013/01/pengertian-administrasi-pertanahan.html> , diunduh 6 Mei 2015